

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Latin “*coopere*”, dalam bahasa Inggris adalah *cooperation*. *Co* artinya bersama dan *Operation* artinya bekerja, *cooperation* berarti bekerja sama.²³ Menurut Moh. Hatta yang bergelar ‘Bapak Koperasi Indonesia’ menjelaskan bahwa,

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang”.²⁴

P.J.V. Dooren berpendapat tidak ada satupun definisi koperasi yang bisa diterima secara umum, namun Dooren memberi definisi koperasi sebagai berikut,

“There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that a cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective”.

Ada berbagai pihak yang memberikan definisi mengenai pengertian koperasi, dari para pemimpin gerakan dan para ahli dari luar maupun dalam negeri. Ada yang mendefinikan secara umum dan universal namun juga ada yang mendefinisikan berdasar pada prinsip-prinsip Koperasi, salah satu contohnya adalah menurut UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1) yaitu berbunyi,

²³ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, 28.

²⁴ *Ibid*, 30-31.

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Adapun definisi koperasi secara ideologi dan universal adalah definisi menurut Moh. Hatta di atas. Selain itu ada definisi menurut Calvert (1959) dalam bukunya yang berjudul *The Law and Principles of Cooperation*, koperasi didefinisikan sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.²⁵

Secara bentuknya koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota secara gotong royong seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini bukan hanya berbentuk gotong royong dalam mempertanggung jawabkan kegiatan koperasi, namun juga memiliki modal bersama.²⁶

Koperasi menggunakan prinsip demokrasi, yaitu kekuasaan dan kewenangan pada koperasi ada pada anggotanya dan setiap anggotanya mempunyai suara dalam menentukan keputusan bersama.²⁷ Kegiatan koperasi yang paling umum adalah simpan pinjam. Usaha simpan pinjam pada koperasi membantu para anggotanya untuk mendapatkan modal usaha tanpa perlu jaminan. Koperasi juga menjadi wadah bagi anggota untuk dapat

²⁵ Muhammad Hasan and et al., *Koperasi & UMKM Konsep Dan Strategi Pengembangannya Dalam Perspektif Kewirausahaan* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 8.

²⁶ Herman Suryo Kumoro and Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Digital Ekonomi* (Malang: UB Press, 2020), 6.

²⁷ Mariana Simanjuntak and et al., *Manajemen UMKM Dan Koperasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 31.

menabung melalui jenis simpanan-simpanan yang ada. Kegiatan pada koperasi tidak hanya berupa bisnis keuangan namun juga kegiatan membina anggota agar menjadi lebih berdaya secara ekonomis.

2. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan pedoman koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi secara praktik. ICA (*International Co-operative Alliance*) melaksanakan Kongres ICA ke-31 di Manchester pada tahun 1995, dan dihadiri oleh 100 negara berhasil mengesahkan Identitas (Jati Diri) Koperasi, yang memuat definisi koperasi, nilai-nilai koperasi, dan prinsip-prinsip koperasi. Menurut Identitas Koperasi yang disahkan oleh ICA, koperasi memiliki 7 prinsip utama, yaitu:

1) Prinsip ke-1: Kenggotaan yang Sukarela dan Terbuka

Koperasi merupakan organisasi yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan, terbuka bagi siapapun yang berkenan menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, latar belakang sosial maupun agama.

2) Prinsip ke-2: Pengawasan Demokratis oleh Anggota

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif membuat keputusan dan menetapkan kebijakan. Para pengurus yang dipilih oleh anggota sebagai wakil anggota, bertanggung jawab terhadap pembukuan dan rapat anggota. Dalam koperasi primer, para anggota memiliki hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara, atau dikelola secara demokratis.

3) Prinsip ke-3: Partisipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi permodalan secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis terhadap pemanfaatan modal tersebut, maka sebagian modal koperasi adalah milik bersama. Bila ada, anggota akan mendapatkan kompensasi yang terbatas atas modal yang disyaratkan untuk menjadi anggota koperasi. Kemudian para anggota akan mengalokasikan sisa hasil usaha untuk salah satu atau semua tujuan berikut :

- 1) mengembangkan koperasi, seperti membentuk dana cadangan.
- 2) membagikan pada anggota seimbang dengan transaksi mereka dalam koperasi.
- 3) mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

4) Prinsip ke-4: Otonomi dan Kemandirian (*Independent*)

Koperasi adalah organisasi otonom. Menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggota. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggota yang mempertahankan otonom mereka.

5) Prinsip ke-5: Pendidikan Pelatihan dan Penerangan

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya, wakil-wakil anggota yang diperoleh dari rapat anggota, agar mereka dapat melakukan tugas lebih efektif bagi perkembangan koperasi. Mereka memberikan penerangan bagi masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian, dan manfaat berkoperasi.

6) Prinsip ke-6: Kerjasama antar Koperasi

Koperasi melayani anggotanya secara kolekti dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama. Melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

7) Prinsip ke-7: Kepedulian terhadap Masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk mengembangkan masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapatanggota.²⁸

3. Tujuan dan Peran Koperasi

Tujuan, fungsi dan prinsip koperasi di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan koperasi adalah,

“untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Sedangkan pada pasal 4 fungsi dan peran koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,

²⁸ Ajija and et al., *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*, 39-41.

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan pertahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya dan,
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²⁹

4. Jenis-Jenis Koperasi

Undang-Undang No. 17, Tahun 2012, pasal 82 menyatakan bahwa jenis koperasi “didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/ kepentingan ekonomi anggota”. Pada pasal ke 84 disebutkan bahwa :

- 1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
- 2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
- 3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
- 4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

²⁹ Ibid, 42.

Kemudian pada Undang-Undang No.12 Tahun 1967, pasal 17 bagian 6, disebutkan jenis koperasi menurut kelompok masyarakat yang mendirikan, yaitu :

- 1) Koperasi Pegawai Negeri, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para pegawai negeri pada suatu daerah kerja.
- 2) Koperasi di Lingkungan Angkatan Bersenjata (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, PRIKOPARADA, PRIMKOPOL), yaitu koperasi sebagai wadah kegiatan kekarayaan anggota angkatan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.
- 3) Koperasi Wanita, Koperasi Guru, Koperasi Kaum Veteran, Koperasi Kaum Pensiun dan sebagainya,yaitu koperasi yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dalam golongannya masing-masing.³⁰

5. Koperasi Wanita

Koperasi wanita adalah koperasi yang seluruh anggotanya adalah perempuan dan seluruh kegiatan koperasi tersebut dioperasikan oleh perempuan. Koperasi wanita menjadi bentuk dari perhimpunan perempuan yang merupakan bagian dari upaya sistem untuk memberdayakan perempuan dan juga emansipasi wanita.

Pada dewasa ini adanya pergeseran waktu, emansipasi, dan perkembangan teknologi juga pendidikan serta tuntutan zaman membuat tidak hanya laki-laki yang perlu berkarir. Adanya persaingan yang ketat

³⁰ Ibid, 43.

dalam bidang ekonomi menjadikan nafkah dari seorang suami saja sering tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehingga seorang istri atau ibu juga dituntut untuk dapat mendukung penghasilan keluarga.³¹ Dari fenomena yang terjadi saat ini, wanita diharapkan mahir dalam mengatur keuangan terlebih dapat menambah pemasukan untuk keluarganya. Namun kendalanya adalah kurangnya fasilitas yang ada untuk mendukung para wanita khususnya ibu-ibu untuk mulai membangun usahanya.

Wanita atau perempuan dalam istilah gender digambarkan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan dan emosional. Namun sayangnya pemikiran yang tumbuh di benak banyak orang mengenai perempuan dibarengi dengan stigma bawa perempuan adalah makhluk yang emosional, pasif, lemah, dekoratif, tidak asertif dan tidak kompeten kecuali untuk tugas rumah tangga.³²

Faktanya wanita tidak hanya bekerja dalam lingkup rumah tangga saja, namun juga dapat ikut berperan dalam kegiatan diluar rumah tangga. Wanita sebagai makhluk yang sama berakal dan berkembang seperti laki-laki juga, dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan jasa dan perdagangan bidang ekonomi. Perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi memiliki porsi yang sama sehingga tidak ada peran terpisah antara keduanya, maka tidak berlebihan bila wanita dan pria dikatakan sejajar dalam status dan peran.³³

³¹ Arsj, "Peningkatan Ekonomi Bagi Anggota Koperasi Wanita PI Tanah Abang Jakarta.", 92.

³² Indah Nur Hilmiyati, Ahmad Syakur, and Amrul Mutaqin, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Barokah Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)" (IAIN Kediri, 2019), 20-21.

³³ Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 116.

Kesejajaran status dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak banyak dirasakan oleh masyarakat hingga kini. Masih banyak stigma yang melekat pada wanita yang menghalangi kebebasannya sebagai makhluk berkembang. Terbatasnya hak wanita masih banyak dijumpai di Indonesia terutama di daerah pedesaan. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap kaum perempuan di Indonesia agar dapat lebih berdaya. Salah satu kegiatan pemberdayaan yang dapat terlihat jelas bentuk dan manfaatnya adalah dengan menghadirkan koperasi wanita yang dapat merangkul kaum perempuan di wilayah pedesaan.

Kata Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment*. Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengartikan *empowerment* dalam 2 arti yaitu : *To give ability or enable to* (memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu), *To give power of authority to* (memberi kewenangan/kekuasaan).³⁴ Menurut Aida Vitayala hakekat pemberdayaan perempuan adalah peningkatan hak, kewajiban, kemampuan, kedudukan, peran, kesempatan, kemandirian, ketahanan spiritual, dan mental perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas SDM.³⁵

Koperasi wanita yang berisi kumpulan perempuan dapat merangkul kaum perempuan lainnya dan memberikan harapan bagi mereka semua untuk dapat hidup lebih merdeka dan bebas memaksimalkan peran yang wanita butuhkan. Koperasi wanita memiliki peran kunci bagi perempuan

³⁴ Maryani and Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 1.

³⁵ Suseno, "Strategi Pengembangan Koperasi Wanita Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh LAPENKOP", 142.

dalam memenuhi kebutuhan dengan menyediakan akses pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Perempuan mendapatkan akses ke sumber daya umum produksi (seperti kredit, fasilitas pemasaran, infrastruktur, peralatan dan teknologi) yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Bergabung dengan koperasi menjadikan perempuan mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan meningkatkan akses mereka ke pasar kerja. Koperasi wanita tampaknya dapat menjadi instrumen terbaik yang dapat membawa peningkatan kesejahteraan perempuan, juga untuk pengembangan transformasi pemikiran yang lebih terbuka bagi perempuan.³⁶

B. Pelatihan

1. Pengertian Pelatihan

Pelatihan merupakan kegiatan yang cukup familiar di masa kini. Banyak sekali kegiatan pelatihan yang diadakan dari berbagai organisasi maupun badan lembaga tertentu. Pelatihan memiliki beberapa sebutan lain seperti diklat, *training*, bahkan ada yang menyamakannya dengan pendidikan. Menurut Leonard Nadler yang memperkenalkan konsep pengembangan SDM pertama kali di AS pada tahun 1969,

“... learning related to the present job of the individual”, “... learning related to a future but defined job for which the individual is being prepared.”, “... learning for the general growth of the individual and/or the organization”, dan “... learning is the acquisition of new skills, attitudes, and knowledge.”

Ringkasnya Nadler menjelaskan bahwa pelatihan adalah suatu proses belajar untuk menguasai keterampilan, pengetahuan dan juga sikap yang baru.

³⁶ Arsj, “Peningkatan Ekonomi Bagi Anggota Koperasi Wanita PI Tanah Abang Jakarta”, 92.

Untuk mempersiapkan seseorang agar mampu melakukan pekerjaan yang saat ini atau kelak akan menjadi tanggungjawabnya sebagai bagian dari perkembangan individu maupun organisasi tempatnya bekerja.³⁷

DaCenzo dan Robbins pada buku *Human Resource Management* tahun 1999 menyatakan bahwa, “*Training is a learning experience in that it seeks a relatively permanent change in an individual that will improve the ability to perform on the job*”.³⁸ Berarti bahwa pelatihan merupakan suatu pengalaman pembelajaran dalam mencari perubahan permanen secara relatif pada suatu individu yang akan memperbaiki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya itu.

Sesuai penjelasan beberapa ahli di atas, pelatihan adalah kegiatan yang dijadikan media untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan pengetahuan juga pengalaman. Maka pelatihan bukan hanya menambah pengetahuan namun juga dapat mengubah pola pikir dan perilaku secara individu maupun organisasi menuju hal yang lebih baik lagi, sesuai tujuan diadakannya pelatihan tersebut. Dapat diambil poin penting dari penjelasan di atas, walau tidak disebutkan secara gamblang namun secara tersirat ada makna pembaharuan didalamnya. Pelatihan memberikan hal baru kepada audien sehingga para peserta dapat memperbaharui kemampuan, pengetahuan, perilaku dan lain sebagainya.

³⁷ Abdorrahman Gintings, *Esensi Praktis; Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan* (Bandung: Humaniora, 2011), 7-8.

³⁸ Wikipedia, “Pelatihan,” *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, accessed November 1, 2021, at 06.32 WIB, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelatihan>.

2. Tujuan Pelatihan

Sesuai dengan definisi dari pelatihan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, keterampilan, kinerja, dan perilaku individu maupun kelompok. Maka kegiatan pelatihan harus dirancang dengan baik sehingga benar-benar dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Tujuan dari setiap pelatihan biasanya sudah tertulis pada judul maupun tema kegiatan pelatihan tersebut.

Tujuan pelatihan yang merupakan bagian dari pemberdayaan, yaitu untuk mempersiapkan masyarakat atau peserta agar mempunyai kemampuan profesional dan kompetensi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan hidupnya atau pekerjaan yang sedang digelutinya.³⁹ Saat ini umumnya tujuan pelatihan dibuat dalam standart kompetensi, pelatihan biasanya digunakan untuk memenuhi suatu kompetensi tertentu. Kadangkala pelatihan dilaksanakan untuk membantu memenuhi suatu jenis kompetensi, suatu level kompetensi, atau kompetensi bidang tertentu. Biasanya alat pretest digunakan untuk mengetahui pada level mana kompetensi dari peserta pelatihan, Sehingga dapat ditentukan level kompetensi yang akan dipenuhi sebagai tujuan pelatihan.⁴⁰

Secara terperinci tujuan pelatihan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi-potensi diri dan lingkungan sehingga dapat

³⁹ Mustofa Kamil, *Model Pendidikan Dan Pelatihan Konsep Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 152.

⁴⁰ Gintings, *Esensi Praktis; Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 8-9.

dikembangkan dan dijadikan peluang pengembangan usaha.

- 2) Mengembangkan keahlian dan keterampilan masyarakat tertentu agar dapat menyelesaikan pekerjaan lebih efektif dan efisien.
- 3) Untuk mengembangkan sikap sehingga dapat menghasilkan kemampuan untuk bekerja dan bekerjasama.
- 4) Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga masyarakat kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya.
- 5) Mampu mengembangkan dan memajukan lembaga sebagai wadah dalam pengembangan usaha.⁴¹

3. Faktor-faktor Pendukung yang Mempengaruhi Dampak Pelatihan

Faktor pendukung yang dapat dikembangkan oleh peserta pelatihan untuk mengembangkan usaha setelah mengikuti pelatihan adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat kesadaran dalam suatu kelompok sangat tinggi.
- 2) Intensitas minat peserta pelatihan sangat tinggi dalam wirausaha.
- 3) Dukungan dari pemerintah desa, kecamatan, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga usaha, lingkungan warga yang dekat dengan tempat tinggal peserta.
- 4) Adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pihak pelaksana pelatihan secara integral dan berkesinambungan.⁴²

⁴¹ Kamil, *Model Pendidikan Dan Pelatihan Konsep Dan Aplikasi*, 153.

⁴² Ibid, 165.

4. Jenis-jenis Pelatihan

Ada lima jenis pelatihan yang sering dilaksanakan menurut Henry Simamora dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia :

1) Pelatihan keahlian (*skills training*)

Program pelatihan yang cukup sederhana, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan yang ada dalam tugas-tugas seorang pekerja. Sehingga pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerjanya.

2) Pelatihan ulang

Program pelatihan yang tujuannya adalah memberikan keahlian untuk pekerja dalam menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah.

3) Pelatihan lintas fungsional

Pelatihan lintas fungsional atau *cross functional training*, merupakan pelatihan yang melibatkan pekerja untuk mempelajari dan mengikuti aktifitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan pokoknya.

4) Pelatihan tim

Pelatihan ini merupakan pelatihan yang melibatkan kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas demi tujuan bersama dalam tim kerja.

5) Pelatihan kreatifitas

creativities training adalah pelatihan yang didasari pada kreativitas pekerja, dengan memberikan kesempatan pada pekerja untuk mengeluarkan gagasan atau ide-ide kreatifnya secara rasional dan layak.⁴³

⁴³ Ajabar, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 23.

5. Proses pelatihan

Pelatihan merupakan kegiatan yang cukup kompleks dan perlu perencanaan yang matang agar dapat menjawab kebutuhan dan memberikan hasil yang tepat. Proses pelatihan terbagi menjadi 3 tahap dan alur itu membentuk suatu siklus dalam penyelenggaraan pelatihan.⁴⁴ Tahap-tahap itu adalah:

1) Pra Pelatihan (*Pre Training*)

- a) Identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan (*training need assesment*). Identifikasi dan analisis ini penting untuk dilakukan sebagai langkah awal dalam mengembangkan program pelatihan. Identifikasi disini merupakan pengumpulan data untuk mengetahui permasalahan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kebutuhan pelatihan merupakan apa yang menjadi kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan nyata. Sedangkan analisis disini merupakan pengolahan data yang sudah teridentifikasi untuk menemukan solusi dari masalah yang sudah ditemukan. Apakah kesenjangan dapat dikurangi atau dihilangkan dan apakah pelatihan berkemungkinan besar untuk menjadi solusinya.⁴⁵
- b) Merumuskan sasaran atau tujuan pelatihan. Setelah identifikasi dan analisis kebutuhan dilakukan, maka perlu ditentukan sasaran atau *outcome* dari diadakannya pelatihan tersebut. Sasaran harus memiliki target dan terukur.

⁴⁴ Rima Gusetyoningsih and Sri Eka Astutiningsih, *Desain Program Pelatihan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 81.

⁴⁵ Ibid, 74.

c) Mempersiapkan kurikulum dan materi. Kurikulum pelatihan merupakan pedoman yang dibentuk dalam rencana penyelenggaraan pelatihan yang merujuk pada dengan metode dan jenis pelatihan yang digunakan sesuai tujuan pelatihan yang dibutuhkan. Pelatihan merupakan transformasi tiga tahap, yaitu pertama dari materi menjadi pemahaman, kedua dari pemahaman menjadi relevan, dan yang ketiga dari relevansi menjadi penerapan. Penentuan dimana, bagaimana, dan oleh siapa pelatihan itu dilakukan harus mempertimbangkan prinsip di atas. Kurikulum dirancang berbasis kompetensi yang harus dicapai dan diuraikan dalam : 1) materi pelatihan; 2) metode penyampaian; 3) proses pembelajaran setiap materi; 4) proporsi dan alokasi waktu.⁴⁶

2) Pelaksanaan Pelatihan (*On Going Training*)

a) Memilih dan menentukan metode. Dalam memilih dan menentukan suatu metode penelitian perlu mempertimbangkan banyak faktor. Tidak ada satu pelatihan yang paling baik dari yang lainnya, semuanya hanya perlu bergantung pada efektivitas biaya, isi pelatihan, fasilitas yang layak, preferensi peserta dan pelatih, dan banyak faktor lain. Dalam menentukan metode harus disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tujuan pelatihan itu sendiri. Yang menjadi salah satu faktor penting dalam memilih metode pelatihan merupakan siapa dan bagaimana audien atau peserta yang akan dilatih, karena

⁴⁶ Ibid, 82.

metode yang paling tepat adalah metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta.

- b) Memetakan Teknis pelatihan yang dilaksanakan. Seperti apa agenda dari pelatihan itu sendiri secara teknis perlu disesuaikan dengan metode yang telah dipilih sebelumnya. hal ini berhubungan dengan prosedur dari pelatihan yang akan dilaksanakan, seperti dimana, bagaimana, berapa lama dan apa saja kegiatannya. Hal ini perlu banyak pertimbangan sama seperti pemilihan metode, diperlukan diskusi yang matang dan sosialisasi dengan peserta, selain itu perlu mempertimbangkan biaya dan seperti apa peserta yang mengikuti.
- c) Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan disini adalah eksekusi dari segala rencana yang telah dibuat. Tahap ini menjadi titik penyesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat.⁴⁷

3) Pasca Pelatihan (*Post Training*)

Tahap *Post Training* merupakan kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mengontrol proses dan hasil dari rencana pelatihan yang telah dilaksanakan. Pada tahap evaluasi pelatihan, hal ini berfokus pada bagaimana mengukur hasil pelatihan dan membandingkan hasil pelatihan dengan sasaran yang ditentukan. Setelah melaksanakan pelatihan perlu melakukan pemantauan terhadap hasil pelatihan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pelatihan dapat dicapai.⁴⁸

⁴⁷ M Syamsul Maarif and Lindawati Kartika, *Manajemen Pelatihan Upaya Mewujudkan Kinerja Unggul Dan Pemahaman Employee Engagement* (Bogor: Penerbit IPB Press, 2014), 24

⁴⁸ Gusetyoningsih and Astutiningsih, *Desain Program Pelatihan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 83.

6. Metode Pelatihan

Andrew E. Sekula (1981) telah mengelompokan metode pelatihan menjadi enam bentuk, yaitu sebagai berikut :

- a. *On the job training methods*. Metode pelatihan langsung praktik mengerjakan sesuatu yang perlu di kerjakan.
- b. *Vestibule* atau Balai. Metode pelatihan secara massal di tempat khusus untuk mengerjakan sesuatu yang khusus.
- c. Metode demonstrasi. Metode pelatihan massal dengan cara memberi peragaan dan menguraikan suatu kegiatan atau pekerjaan.
- d. Metode simulasi. Pelatihan yang berbentuk pelaksanaan pekerjaan diluar tempat kerja, tetapi dibuat seakan-akan mirip dengan situasi dan kondisi tempat kerja.
- e. *Apprenticeship methods*, metode pelatihan seperti *on the job training methods* tetapi dengan keahlian dan pendampingan yang khusus.
- f. Metode ruang kelas. Metode pelatihan yang dilakukan di kelas seperti pelajaran dikelas pada umumnya.⁴⁹

7. Indikator Pelatihan

Program pelatihan pada dasarnya bersisi pembelajaran yang dilaksanakan agar peserta dapat menguasai kemampuan dan pengetahuan yang dialatihkan. Dalam melaksanakan sebuah program pelatihan perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat menjadi kriteria atau indikator sebuah pelatihan. indikator-indikator pelatihan adalah sebagai berikut :

⁴⁹ Felik Sad Windu Wisnu Broto, *Modul Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar Metode AR* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 19.

- a. Instruktur/pelatih, pelatih yang dipilih untuk menyampaikan materi harus merupakan seseorang yang kompeten sesuai bidangnya.
- b. Peserta, peserta pelatihan harus ditentukan sesuai standar atau kualifikasi tertentu agar sesuai target pelatihan.
- c. Materi, materi yang disampaikan haruslah sesuai dengan jenis pelatihan dan tujuan pelatihan itu sendiri, dan baiknya materi pelatihan merupakan yang *ter-update* agar peserta bisa menyesuaikan keadaan yang terjadi sekarang.
- d. Metode, metode pelatihan yang sesuai akan menjamin keberlangsungan pelatihan, hal ini harus disesuaikan dengan jenis materi dan komponen peserta pelatihan.
- e. Tujuan, pelatihan harus memiliki tujuan yang ditentukan, khususnya terkait penyusunan rencana aksi dan penetapan sasaran. Tujuan pelatihan perlu disosialisasikan sebelumnya agar para peserta dapat memahami tujuan dari pelatihan.
- f. Sasaran, sasaran pelatihan harus ditentukan dengan kriteria yang terperinci dan terukur.⁵⁰

Ada pula empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dari sebuah program pelatihan, menurut Heinich dan hawan-kawannya:

- a. Mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi dari program pelatihan.

⁵⁰ Firdaus and Suarni Norawati, *Peran Motivasi Sebagai Moderasi Pada Korelasi Kinerja Karyawan* (Indramayu: Penerbit Abad, 2022), 57-58.

- b. Mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara berkesinambungan.
- c. Mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah dilatihkan.
- d. Mampu mendorong peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai dalam dunia kerja.⁵¹

C. Wirausaha

1. Definisi Wirausaha

Wirausaha dalam bahasa Inggris yaitu *entrepreneur*. Dalam bahasa Indonesia awalnya dikenal wiraswasta yang mempunyai arti berdiri di atas kekuatan sendiri, istilah tersebut kemudian berkembang menjadi wirausaha. Wirausaha adalah kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap suatu produk atau jasa melalui transformasi, kreativitas, inovasi dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya sehingga produk atau jasa tersebut dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna.

Menurut Dan Steinhoff dan John F. Burgess Wirausaha adalah Orang yang mengorganisir, mengelola dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang usaha. Wirausaha adalah mereka yang mendirikan, mengelola mengembangkan dan mencipta-kan lapangan kerja bagi orang lain dengan berswadaya. Definisi ini mengandung asumsi bahwa setiap orang dapat menjadi wirausaha asal mempunyai kesempatan untuk belajar dan mau berusaha.

⁵¹ Benny A. Pribadi, *Desain Dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi: Implementasi Model ADDIE* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 9.

Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang. Adapun unsur-unsur penting wirausaha adalah

- 1) unsur pengetahuan,
- 2) unsur keterampilan,
- 3) unsur sikap mental,
- 4) unsur kewaspadaan.⁵²

Thomas W. Zimmerer merumuskan manfaat berwirausaha sebagai berikut :

- 1) Memberi peluang dan kebebasan mengendalikan nasib sendiri.
- 2) Memberi peluang melakukan perubahan, pebisnis menemukan cara mengkombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap isu sosial dan ekonomi dengan harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
- 3) Memberi peluang mencapai potensi diri sepenuhnya, memiliki usaha sendiri memberikan kekuasaan, kebangkitan spiritual dan membuat wirausaha mampu mengikuti minat atau hobbinya.
- 4) Memiliki peluang memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- 5) Memiliki peluang untuk ikut berperan aktif dalam masyarakat dan dapat diakui atas usahanya.
- 6) Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam menjalankannya.⁵³

⁵² Rina Rachmawati, *Kewirausahaan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 4-5.

⁵³ Rintan Saragih, "Membangun Usaha Kreatif, Inovatif Dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial," *Jurnal Kewirausahaan* 3, no. 2 (2017), 27.

2. Karakteristik Wirausaha

Seorang wirausahawan haruslah memiliki tekad berkembang yang tinggi, karena menjadi wirausaha perlu memandang kedepan untuk membuat strategi selanjutnya dalam bisnisnya. Wirausahawan perlu berfikir kritis dan penuh perhitungan, karena setiap peluang datang bersama resiko pula. Untuk terus meningkatkan usahanya, wirausahawan harus menciptakan kreatifitas dan inovasi. Dari penjelasan di atas para wirausahawan umumnya memiliki karakteristik yang terbentuk melalui proses jangka panjang berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya selama menjalankan bisnis.

Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarborough mengemukakan teori delapan karakteristik wirausaha, yaitu sebagai berikut :

- a) *Desire for responsibility*, artinya memiliki rasa tanggung jawab atas usaha. Seorang wirausaha yang bertanggung jawab akan selalu mawas diri dan menjalankan usahanya dengan penuh dedikasi.
- b) *Preference for moderate risk*, artinya memilih resiko yang moderat. Wirausahawan selalu mengambil resiko yang diperhitungkan, dia cenderung menghindari resiko yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi. Wirausahawan akan meminimalisir resiko yang ada, namun berpikir realistis dalam mengambil peluang yang berimbang dengan resikonya.
- c) *Confidence in their ability to succes*, artinya memiliki kepercayaan diri untuk meraih kesuksesan. Wirausahawan akan sangat yakin terhadap

kemampuannya dan juga rencananya dalam mensukseskan bisnisnya. Untuk mencapai keyakinanya itu tentunya wirausahawan akan berusaha menambah ilmu dan pengetahuannya dalam bidang usahanya.

- d) *Desire for immediate feedback*, hasrat untuk mendapatkan umpan balik segera. Wirausahawan akan mencintai pekerjaannya dan menikmati tantangan yang dihadapinya, dia selalu ingin mengetahui seberapa baik produk atau jasanya dan mencari umpan balik secepatnya. Umpan balik ini dapat berupa kritik, saran atau opini dari customer ataupun orang lain disekitarnya yang akan dia jadikan dorongan untuk menjadi lebih baik lagi.
- e) *High level of energy*, artinya memiliki tingkat energi yang tinggi. Wirausahawan biasanya lebih energik dari orang lain, dia memiliki semangat yang tinggi dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya. Tidak mudah untuk menjalankan suatu usaha, butuh upaya yang keras dan kedisiplinan, wirausahawan cenderung optimis dan tidak mudah putus asa.
- f) *Future orientation*, memiliki orientasi masa depan. Wirausahawan memiliki pikiran yang panjang, dan berwawasan jauh kedepan. Mereka biasanya tidak terlalu memikirkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi lebih berfikir tentang apa yang perlu dikerjakan ke depannya, langkah apa selanjutnya. Wirausahawan akan selalu melakukan perencanaan dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, mereka mampu membaca potensi yang ada disekitarnya untuk kemajuan usaha mereka di masa depan.

- g) *Skill of organizing*, artinya memiliki keterampilan dalam merorganisasi. Wirausahawan perlu mengorganisasikan sumber daya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah. Dia mampu mengumpulkan dan mengatur orang-orang yang tepat sesuai tugasnya sehingga mencapai tujuannya.
- h) *Value of achievement over money*, artinya nilai prestasi lebih tinggi dari pada uang. wirausahawan lebih menghargai prestasi dari pada uang, mereka lebih mementingkan prestasi dan pencapaian usahanya, sedangkan uang dijadikan sebagai hasil tambahan dari prestasi yang dicapainya.⁵⁴

3. Faktor keberhasilan dalam wirausaha

Dalam menjalankan usaha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar usaha mencapai kesuksesan. Keberhasilan usaha sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor saja, ada banyak faktor yang perlu diseimbangkan agar saling mendukung untuk tujuan usaha. Menurut Hendro, keberhasilan usaha dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini :

- a. Faktor peluang. Wirausahawan harus mampu membaca situasi dan mendapatkan peluang yang ada, membuat strategi yang cocok untuk mengembangkan usaha.
- b. Faktor organisasi. Organisasi disini maksudnya adalah struktur, formasi dan sistem dari usaha yang dijalankan. Seorang wirausaha harus mampu mengorganisasikan sumber daya yang secara tepat untuk kemajuan

⁵⁴ Addis Yudhistira Ramdani and Astri Ghina, "Identifikasi Karakteristik Wirausahawan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis (Studi Kasus Ir. Kunto Herwibowo Owner CV. Spirit Wira Utama)," *e-Proceeding of Management* 3, no. 3 (2016): 3043.

- usahanya. Organisasi usaha ini bersifat tidak tetap, dinamis, inovatif dan berwawasan semakin kedepan.
- c. Faktor dalam mengelola usaha. Ini meliputi *quality*, *time*, dan *cost*. *Quality* berkaitan dengan kualitas produk dan atau pelayanan. *Time* disini berarti pengelolaan waktu dalam penyelesaian produk, waktu bekerja, dan juga perbaikan atau evaluasi. *Cost* berkaitan dengan biaya untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik atau juga disebut modal.
- d. Faktor pemasaran dan penjualan. Faktor ini memiliki peran penting dalam memaksimalkan usaha. Sistem promosi dan distribusi produk perlu dipikirkan dengan matang. Karena ini merupakan faktor yang langsung berhubungan dengan konsumen tentunya perlu banyak melibatkan kreatifitas.
- e. Faktor adnistrasi. Jalannya usaha perlu adanya dokumentasi dan pengelolaan data yang baik agar rencana dan strategi usaha dapat dijalankan dengan baik. Administrasi menjadi penting di jaman yang modern ini, karena pengelolaan data diperlukan untuk kepentingan usaha, negara, dan juga pelanggan.
- f. Catatan bisnis. Catatan bisnis ini perlu dibuat karena bisa dijadikan parameter untuk mengevaluasi usahanya. Dengan adanya catatan bisnis ini wirausaha dapat mengetahui sejauh mana usahanya telah berkembang dan juga dapat dijadikan sumber sejarah yang bisa membanggakan pelaku usaha.⁵⁵

⁵⁵ Cahyadi, *Pemanfaatan Media Terhadap Keberhasilan Wirausaha*, 36.

4. Keberhasilan Usaha

Setiap wirausahawan menginginkan usahanya terus berkembang dan mengalami kesuksesan. Kesuksesan atau keberhasilan usaha menjadi pencapaian yang disematkan ketika wirausahawan sudah memenuhi beberapa kriteria tertentu. Menjadi wirausahawan yang berhasil tidak harus atas penilaian orang lain, seberapa berhasil seseorang dalam menjalankan bisnisnya, maka dialah yang pertama kali merasakan dan menilainya. Keberhasilan usaha ini sangat lekat dengan proses dan hasil usaha, orang yang paling mengerti keberhasilan usaha yaitu pelaku usaha itu sendiri.

Keberhasilan dari seorang wirausaha tidak didapat dengan instan, ada proses, usaha, ketekunan dan resiko yang dilibatkan untuk mencapainya. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa keberhasilan dihitung dari harta dan jabatan yang dimiliki. Seorang wirausaha pastinya memiliki rencana bisnis dan didalamnya akan merangkum strategi dan proses untuk mencapai tujuan besarnya. Wirausahawan dikatakan sukses ketika apa yang dicita-citakan dan menjadi tujuan pendirian usahanya sudah tercapai dan tercukupi.⁵⁶

Henry Faizal menyatakan bahwa keberhasilan usaha merupakan keberhasilan suatu bisnis dalam mencapai tujuannya, usaha yang mendapatkan laba dapat dikatakan usaha yang berhasil, karena salah satu tujuan seseorang mendirikan usaha adalah untuk mendapatkan laba.⁵⁷

Keberhasilan usaha memang erat kaitannya dengan laba dan pendapatan,

⁵⁶ Ibid, 34.

⁵⁷ Ana Noor Andriana, *Peran Wirausaha Dalam Pengembangan UMKM Dan Desa Wisata* (klaten: lakeisha, 2021), 5.

namun keberhasilan usaha juga mencakup tujuan-tujuan pendirian usaha yang tidak melulu soal uang.

Keberhasilan usaha yang didefinisikan sebagai tercapainya tujuan usaha menjadi bermakna luas. Wirausahawan yang menargetkan tujuan yang sederhana akhirnya menjadi lebih cepat merasa berhasil dari pada mereka yang menggantungkan tujuannya distandart yang lebih tinggi. Maka banyak para ahli yang akhirnya membuat kriteria atau indikator dari keberhasilan wirausaha, agar keberhasilan usaha ini menjadi lebih terukur dan dapat dijadikan patokan oleh para wirausahawan untuk menentukan tujuan usahanya. Menurut smallbone dkk, ukuran keberhasilan dapat dilihat dengan tiga kriteria, yaitu kemampuan dalam mencapai penjualan minimum, laju pertumbuhan bisnis dan kestabilan keuangan. pertumbuhan bisnis dan kestabilan keuangan.⁵⁸

Patokan dari keberhasilan usaha tentunya dibentuk dari faktor yang erat kaitannya dengan perkembangan usaha dan yang seharusnya memang menjadi tujuan sebuah usaha. Indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Riyanti, kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan usaha dapat dilihat dari :

- a. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal
- b. Jumlah produksi
- c. Jumlah pelanggan
- d. Perluasan usaha

⁵⁸ Asnawati, *Kewirausahaan Teori Dan Contoh-Contoh Rencana Bisnis* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 46.

- e. Perluasan daerah pemasaran
- f. Perbaiki sarana fisik
- g. Pendapatan usaha.⁵⁹

Beberapa indikator keberhasilan wirausaha menurut Willy Cahyadi adalah Mempunyai modal usaha yang kuat, Tenaga kerja untuk menjalankan usaha, Memiliki kemampuan/*Skill*, Laba/keuntungan mengalami kenaikan.⁶⁰

- a. Mempunyai modal usaha yang kuat

Modal sendiri artinya adalah sebuah dana atau aset untuk menjalankan usaha. Maka modal merupakan sumber untuk menciptakan daya. Modal dalam sebuah usaha menjadi sebuah faktor penting yang mempengaruhi hasil usaha. Modal usaha harus kuat, kuat artinya tidak mudah goyah dan terpengaruh. Modal yang kuat maksudnya modal usaha haruslah baku, tidak mudah dikurangi atau dialokasikan pada hal selain kebutuhan usaha.

Modal yang kuat seharusnya semakin bertambah sejalan dengan perkembangan usaha itu sendiri. Modal yang kuat tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal karena modal usaha sebaiknya memiliki dasar yang terjamin, dana yang digunakan bukan dana yang perlu segera diambil, ilmu yang digunakan juga melalui sumber yang terpercaya.

⁵⁹ Djoko Setyo Widodo, *Membangun Startup Entrepreneur Yang Unggul* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2020), 180.

⁶⁰ Cahyadi, *Pemanfaatan Media Terhadap Keberhasilan Wirausaha*, 36.

Modal berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Modal Konkret (Modal Aktif), yaitu jenis modal yang dapat dilihat secara kasat mata atau berwujud. Contohnya : biaya, bahan baku, gedung, mesin, kendaraan, dan sarana prasarana usaha yang lainnya.
- 2) Modal Abstrak (Modal Pasif), yaitu jenis modal yang menjadi kebalikan modal konkret yang mana tidak dapat dilihat secara kasat mata. Contohnya : ilmu pengetahuan, peluang usaha, ide usaha, *skill*/ keterampilan, hak cipta, nama baik perusahaan, koneksi, dan lain-lain.⁶¹

b. Tenaga kerja untuk menjalankan usaha

Tenaga kerja merupakan istilah lain dari sumber daya manusia (SDM) yang memiliki arti manusia secara individu, kelompok, maupun komunitas yang memiliki potensi, dapat berupa ide atau gagasan, kemampuan fisik dan berpikir, kemampuan emosional dan sosial, baik yang dimiliki secara alamiah atau yang yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman.⁶²

Keberhasilan usaha juga ditentukan oleh penggerak usaha tersebut. Tenaga kerja untuk menjalankan usaha maksudnya adalah keseluruhan orang yang menjadi anggota dari usaha dan menjalankan

⁶¹ Puji Muniarty and et al., *Strategi Pengelolaan Manajemen Resiko Perusahaan* (cirebon: Penerbit Insani, 2021), 196.

⁶² Ambar Teguh Sulistiyani and Nursam, *Solusi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Di Daerah Tertinggal* (Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Republik Indonesia, 2019), 12.

tugas- tugas tertentu sesuai potensinya, untuk keberlangsungan usaha.⁶³

Wirausaha yang mencapai keberhasilan pasti memiliki tenaga kerja yang mumpuni dan memiliki keahlian untuk bisa mengembangkan usahanya.

c. Memiliki kemampuan/*Skill*

skill atau yang biasa disebut Keahlian adalah merupakan kemampuan dalam menggunakan akal pikiran, ide dan kreatifitas untuk melakukan, membuat atau mengubah sesuatu menjadi lebih bermakna dan juga menghasilkan nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Ada pengertian lain yang mendefinisikan *Skill* yaitu pengetahuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktek sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan.⁶⁴

Menurut Dunnette (1976), *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan, yang merupakan pengembangan hasil training dan pengalaman yang didapat.⁶⁵ Keahlian merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang bersifat spesifik, fokus, namun dinamis yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya.

keahlian ini merupakan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam pada sebuah bidang. Keahlian ini dapat dikembangkan dalam bidang apa saja, seperti: ekonomi, pemasaran, kepemimpinan, kesehatan,

⁶³ Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 68.

⁶⁴ Aris Ariyanto and et al., *Entrepreneurial Mindsets & Skill* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 26.

⁶⁵ Suprihatiningsih, *Prakarya Dan Kewirausahaan Tata Busana Di Madrasah Aliyah (Pengenalan Dna Praktik Penggunaan Alat Jahit Mesin Dan Manual)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 49.

penerbangan, investasi, olahraga, dan sebagainya. Keahlian juga bisa tentang apa yang perlu dimakan, cara berjalan, cara menebang pohon, keahlian bisa tentang apa saja yang dilakukan manusia. seorang wirausaha harus memiliki *skill* sesuai dengan bidang bisnisnya. Wirausaha dapat mencapai keberhasilannya, ketika wirausahawan dapat mengembangkan keahlian untuk menunjang usahanya.

d. Laba/keuntungan mengalami kenaikan.

Laba atau biasa disebut profit merupakan keuntungan dari operasional sebuah usaha. Dalam berbisnis tentunya salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan /laba. Wirausahawan yang berhasil dapat mengelola keuntungan usaha untuk mengembangkan usahanya. Bisnis yang semakin berkembang akan berdampak pada keuntungan/laba yang mengalami kenaikan sejalan dengan usahanya.

D. Wirausaha dalam Islam

Agama Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Islam merupakan agama integral yang mengatur semua urusan manusia, salah satunya adalah pemberdayaan umat yang merupakan hal penting dalam Islam. Manusia diciptakan menjadi khalifah untuk mengatur dan memakmurkan bumi, tentunya dengan kewajiban beribadah kepada Allah. Ibadah sendiri tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebelum manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pemenuhan hidup tersebut menjadi kewajiban baginya. Sesuai salah satu kaedah fiqh yaitu,

“sesuatu yang wajib, yang tidak dapat sempurna kecuali dengan suatu hal, maka suatu hal tersebut menjadi wajib pula”. Tugas manusia menjadi khalifah menuntut adanya kegiatan dan kewajiban manusia beribadah memerlukan pemenuhan kehidupan, maka keduanya mengharuskan adanya upaya, usaha dan kerja keras.⁶⁶

Dalam melaksanakan fungsi kekhalifahan untuk memakmurkan bumi dan bahkan untuk beribadah secara baik tidak dapat terlaksana tanpa adanya harta benda dan kesucian jiwa. Maka unsur materi dan rohani haruslah berimbang dan berdampingan.⁶⁷ Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk berusaha (bekerja), hal ini tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan manusia untuk bekerja keras :

1. Surah An-Najm (53) ayat 39-41, Allah SWT berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ
الْجُزَاءَ الْأَوْفَى (٤١)

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.(39) Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).(40) Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.(41)”

2. Surah An-Naba (78) ayat 11, Allah SWT berfirman:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: “Dan Kami jadikan waktu siang untuk mencari penghidupan.”⁶⁸

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang selatan: Penerbit Lentera Hati, 2022), 4.

⁶⁷ Ibid, 10.

⁶⁸ Hasnah Rimiyati and Mujiati Munawaroh, “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Pada Pengusaha UMKM Muslim Di Kota Yogyakarta),” *Jurnal Manajemen Bisnis* 7, no. 2 (2016): 131-132.

Banyak orang yang berfikir bekerja hanyalah urusan dunia, karena dari yang kita tahu hasil yang paling terlihat adalah laba, harta, dan jabatan. Hal tersebut tidaklah salah, namun perlu kita ingat bahwa manusia tidak dapat menyelesaikan urusan akhirat tanpa melalui urusan dunia. Orang-orang menduga bahwa harta yang diusahakan setiap pebisnis bukanlah sesuatu hal yang istimewa dalam ajaran Islam. Hal tersebut tidaklah benar, Al-Quran memberi perhatian dan mendorong umat Islam untuk mencari harta.⁶⁹

Perhatian dan dorongan Al-Quran kepada umat Islam untuk mencari harta, antara lain:

1. Jumlah pengulangan kata *mal*/harta dalam Al Quran sebanyak 85 kali, seimbang bahkan bahkan lebih banyak dari pengulangan kata *nabi* yang sebanyak 80 kali.
2. Penamaan harta yang banyak dengan *al-Khair* yang secara harfiah berarti baik (QS. al-Baqarah [2]:180) atau perintah mencari *fadh* yang secara harfiah berarti *kelebihan* (bukan sekadar kecukupan), pada QS. al-Jumua [62]:9-10.
3. Penegasan bahwa harta adalah *qiyaman lin-nas/pokok kehidupan manusia* dan perintah mengembangkan harta anak yatim, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan mereka dari keuntungan pengembangan, bukan dari modal (QS. an-Nisa [4]:5).
4. Perintah menulis utang piutang meskipun hanya sedikit agar harta tidak hilang atau bersilang pendapat (QS. al-Baqarah [2]:282).

⁶⁹ Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, 9.

5. Hal tersebut di atas (dan sekian lainnya), disebutkan oleh Allah SWT. dalam Al-Quran karena Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah yang bertugas memakmurkan bumi ini (QS. Hud [11]:61).⁷⁰

Sebelum Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul dan fokus menyampaikan dakwah Islam, beliau melakukan banyak kegiatan bisnis, contohnya berdagang. Setelah Nabi Muhammad saw. menjadi Rasul beliau tetap menganjurkan umatnya melakukan kegiatan bisnis dan berdagang, hal tersebut juga karena Al-Quran menganjurkannya.⁷¹ Pada masa kini kegiatan berdagang dan mendirikan bisnis disebut berwirausaha. Wirausaha merupakan kegiatan menciptakan, mendirikan dan mengelola usahanya atau bisnisnya sendiri, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain untuk dapat berkerja kepadanya.

Wirausaha sendiri dalam Islam merupakan bentuk dari mencari penghidupan, atau disebut berusaha dan bekerja. Menurut Imam asy-Syaibani, kerja (*al-kasb*) didefinisikan sebagai mencari memperoleh harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, hal tersebut disebut sebagai kegiatan produksi. Dalam pandangan islam kegiatan produksi merupakan kewajiban *imarah kaun*, yaitu menciptakan kemakmuran untuk semua makhluk. Kerja merupakan bagian dari kegiatan produksi, menurut Imam asy-Syaibani kerja memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.⁷²

⁷⁰ Ibid, 10.

⁷¹ Ibid, 8.

⁷² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 137.

Sesuai uraian tersebut, menurut Imam asy-Syaibani orientasi bekerja merupakan hidup untuk mendapat keridhaan Allah. Bekerja merupakan usaha untuk mengaktifkan perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi dan distribusi, yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian kerja mempunyai peran penting dalam memenuhi hak Allah SWT, hak hidup, hak keluarga, dan hak masyarakat.⁷³

Dalam konteks berbisnis dan berwirausaha, ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Al-Quran, hal ini dibagi menjadi 3 kelompok besar :

1. Pertama : berkaitan dengan hati/kepercayaan pebisnis.

Setiap kegiatan muslim haruslah dikaitkan dengan akidah/kepercayaan. Sama halnya dengan berbisnis, harus dikaitkan dengan Allah SWT beberapa diantaranya adalah meluruskan niat yaitu untuk mencari dan menafkahkan harta, maka hal tersebut akan dihitung ibadah. Selalu mengingat bahwa harta adalah titipan Allah, harta adalah ujian, dan Hanya Allah lah yang menganugerahkan reeki kepada kita. Memiliki kepercayaan bahwa Allah menjamin setiap rezeki dari makhluk-Nya, sesuai usahanya masing-masing, dan rezeki tersebut tidak hanya bersifat material saja, ada kesehatan, kabar baik, pelajaran hidup juga bagian dari rezeki.⁷⁴

2. Kedua : berkaitan dengan moral dan perilaku pebisnis.

Dalam menangani seluruh masalah kehidupan, Islam menekankan sisi moralitas karena itulah hukum-hukum yang di tetapkan Allah. Termasuk

⁷³ Ibid., 139

⁷⁴ Shihab, *Berbisnis Dengan Allah.*, 15.

dalam aspek ekonomi selalu dikaitkan-Nya dengan moral untuk menciptakan hubungan timbal balik yang harmonis. Hal ini berarti bahwa setiap manusia perlu untuk menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Setiap pelaku bisnis harus memperlakukan mitranya sebagaimana ia ingin di perlakukan. Beberapa bentuk moralitas adalah: kejujuran dalam berbisnis, pemenuhan janji dan perjanjian sesuai akad, toleransi, keluwesan, dan keramahtamahan.⁷⁵

3. Berkaitan dengan pengembangan harta/perolehan keuntungan.

Ada tiga bentuk pemanfaatan harta yang ada, yaitu dibelanjakan (dikeluarkan untuk kebutuhan), diinvestasikan, ditumpuk. Dari ketiganya, yang paling dilarang adalah menumpuk harta tanpa fungsi sosial, menumpuk harta tidak ada manfaatnya dilihat dari segi berkehidupan ataupun segi agama. Sedangkan untuk membelanjakan dan menginvestasikan harta perlu berhati-hati, agar sesuai dengan syariat Islam dan menghindari pemanfaatan harta untuk hal yang negatif dan dilarang agama. Terdapat beberapa prinsip Islam dalam konteks pengembangan harta, yaitu kehalalan, saling menerima dengan ikhlas, kemanfaatan, keseimbangan keuntungan antara pelaku ekonomi, kejelasan akad, persaingan yang sehat.⁷⁶

Dalam berwirausaha (berbisnis), tentu pelaku usaha mendambakan sebuah keberhasilan. Keberhasilan dari berwirausaha tidak memiliki patokan pasti antara wirausaha satu dan lainnya, namun secara konvensional ada

⁷⁵ Ibid., 18-19.

⁷⁶ Ibid., 23.

beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan usaha. Tentunya secara konvensional indikator-indikator tersebut dibentuk sesuai ilmu ekonomi umum, dan kepentingan duniawi tanpa ada hubungannya dengan agama. Keberhasilan usaha sendiri terjadi ketika suatu usaha dapat mencapai tujuan bisnisnya.

Dalam islam wirausaha (bekerja) sendiri memiliki makna yang lebih luas dari pada pengertian konvensional yang berfokus pada keuntungan dan dunia. Wirausaha sesuai penjelasan pada paragraf-paragraf sebelumnya, merupakan bentuk ibadah, pencarian karunia Tuhan, dan juga bagian dari tugas menjadi khalifah di bumi. Dari semua penjelasan sebelumnya, berwirausaha (bekerja) yang secara islam harus sesuai syariat, yang diatur ketentuannya, yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan Rasulullah, semuanya memiliki tujuan tidak lain adalah untuk memakmurkan manusia.

Dikatakan bahwa ketika manusia memenuhi ketentuan-ketentuan Allah dalam interaksi bisnisnya, maka dia berbisnis di jalan Allah, dan tidak akan pernah merugi.⁷⁷ Tujuan berwirausaha dalam islam adalah untuk mencapai kemakmuran dan kemaslahatan umat manusia. kemaslahatan disini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perelahan apa-apa yang dituntut oleh kebutuhan emosional dan intelektualnya.⁷⁸

Dalam Islam, Masalah merupakan tujuan akhir diciptakannya aturan dan ketentuan Syariah, baik yang mengandung manfaat maupun yang

⁷⁷ Ibid., 25.

⁷⁸ Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer.*, 254.

menghilangkan mudharat. Hal ini mencakup seluruh urusan manusia di bumi, baik mencakup aspek berkehidupan, urusan, agama, sosial ataupun ekonomi.⁷⁹ Dalam hal ini Imam asy-Syatibi mengemukakan konsep *maqashid al-syariah*. Secara bahasa *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, *maqashid* artinya kesengajaan atau tujuan, *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, atau jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah Imam asy-Syatibi mengatakan “sesungguhnya Syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.⁸⁰

Kewajiban-kewajiban dalam Syariah menyangkut perlindungan *maqashid al-syariah* bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia. Maqashid syariah merupakan tujuan syariat yang digunakan untuk mengukur pencapaian masalah. Menurut Imam al-Ghazali, masalah dapat tercapai ketika lima unsur pokok maqashid syariah dapat terwujud dan dipelihara, diantaranya yaitu; pemeliharaan agama (*hifs ad-din*), pemeliharaan jiwa (*an-nafs*), pemeliharaan akal (*al-aql*), pemeliharaan keturunan (*an-nasl*) dan pemeliharaan harta (*al-mal*). Dari pandangan Imam al-Ghazali, perkembangan ekonomi merupakan bagian kewajiban manusia dalam hal sosial yang memiliki ketetapan dari Allah dan jika tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan terganggu bahkan binasa. Kegiatan ekonomi harus dilakukan secara efisien dan sesuai syariah, karena bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.⁸¹

⁷⁹ Ibid., 165.

⁸⁰ Ibid., 254.

⁸¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Rajagrafindo, 2016), 261.

Menurut Imam asy-Syatibi *Maqashid* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharuriyat*, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
2. *Hajiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik.
3. *Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

Mustofa Anas Zarqa, seorang ulama asal Yodania menjelaskan bahwa tidak terwujudnya *dharuriyat* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhiria secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyat* tidak sampai merusak kelima unsur pokok kehidupan, namun dapat mempersulit manusia dalam melaksanakannya. Pengabaian terhadap *tahsiniyat* mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna.⁸²

1. Memelihara Agama (*Hifz al-din*)

Menjaga dan memelihara agama dalam tingkat *daruriyat* (pokok) yaitu melaksanakan kewajiban agama yang wajib, contohnya melaksanakan shalat wajib lima waktu, jika tidak dilaksanakan maka terancamlah keutuhan agamanya. Berdasarkan tingkat *hajiyat* contohnya melaksanakan shalat jama' dan qashar bagi yang sedang berpergian, jika tidak dilaksanakan tidak akan mengancam keutuhan agama tetapi akan mempersulit orang yang sedang berpergian. Selanjutnya tingkatan

⁸² Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer.*, 254-255.

tahsiniyat contohnya mengikuti petunjuk agama, menjunjung tinggi martabat manusia dan melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah, seperti menutup aurat ketika shalat atau ketika diluar shalat, mempraktekan akhlak terpuji. Jika tidak dilaksanakan tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya.

2. Memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyat* berupa memenuhi kebutuhan pokok manusia, seperti makanan untuk mempertahankan hidup, jika tidak terlaksana akan mengancam jiwa manusia. Dalam tingkatan *hajiyyat* seperti dibolehkannya mencari dan menikmati makanan dan minuman yang lezat, jika tidak terlaksana tidak sampai mengancam jiwa manusia tetapi akan mempersulit hidupnya saja. Selanjutnya dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan tidak akan mengancam jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia.

3. Memelihara Akal (*Hifz al – Aql*)

Memelihara akal pada tingkatan *daruriyat* seperti diharamkannya meminum minuman keras, jika tidak dihindarkan akan berakibat rusaknya akal. Dalam tingkat *hajiyyat* seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan, jika tidak dilakukan tidak akan merusak akal namun akan mempersulit kehidupannya. Sedangkan dalam tingkat *tahsiniyat* adalah menghidarkan diri dari berkhayal dan mendengarkan hal tidak berfaedah, hal ini berkaitan dengan etika dan tidak mengancam akal secara langsung.

4. Memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Memelihara keturunan pada tingkat *daruriyat* yaitu adanya syariat menikah dan larangan berzina, jikalau aturan tersebut tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan. Dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada suami, jika tidak dilakukan akan menyulitkan suami karena ia harus membayar mahar misil. Adapun dalam masalah talak jika suami tidak menggunakan hak talaknya maka suami akan kesulitan ketika keluarganya sudah tidak harmonis lagi. Selanjutnya, dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan, hal ini dilakukan dalam melengkapi perkawinan, apabila ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan hanya sedikit mempersulit saja.

5. Memelihara harta (*Hifz al-mal*)

Memelihara harta dalam tingkatan *daruriyat*, seperti yang disyariatkan tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, jika aturan dilanggar akan mengancam keutuhan harta. Dalam tingkatan *hajiyyat* seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam, jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya mempersulit orang yang membutuhkan modal. Dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat dengan masalah etika bermuamalah atau yang kita ketahui dengan

etika bisnis. Hal ini juga berpengaruh kepada kesalahan syarat adanya peringkat pertama dan kedua.⁸³

Keselamatan akhirat adalah alasan utama diadakannya syariat, namun itu bukan berarti manusia harus meninggalkan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan masalah duniawi. Allah menghendaki adanya keseimbangan (*balance*), yaitu memperbolehkan manusia dalam mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih baik, namun juga tetap mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan dunia. Tidak akan diperoleh kehidupan akhirat yang baik bila kehidupan dunianya tidak baik.⁸⁴

⁸³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 227-230.

⁸⁴ Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer.*, 166.